

# GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIGAS	SUARA KARYA	3	26-8-2002

## Ribut<sup>2</sup> Ladang Minyak Cepu, Harus Bagaimana?

**M**emperpanjang kontrak pengelolaan dan pemeliharaan sebuah lapangan tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi jika kontrak itu sudah diminta diperpanjang saat masa berakhir kontraknya masih sangat lama.

Adalah PT ExxonMobil Cepu Ltd yang bertindak demikian. Anak perusahaan PT ExxonMobil Oil Co ini menghendaki kontrak kerjasama teknis pengelolaan dan pemeliharaan (*Technical Assistance Contract/TAC*) di ladang minyak Cepu, Jawa Tengah milik Pertamina, diperpanjang hingga tahun 2030, meski kontraknya sendiri baru berakhir pada 2010 mendatang.

Selama belum ada kepastian bahwa kontrak itu diperpanjang, pihak Exxon memilih tidak melakukan tambahan investasi guna meningkatkan produksi di lapangan minyak tua itu.

Apalagi selama ini investasi yang dikeluarkan ExxonMobil untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak di lapangan tersebut mencapai 380 juta dolar AS.

Untuk itu, seperti yang dituturkan *Executive Director* PT ExxonMobil Oil, HJ Longwell beberapa waktu lalu, pihaknya akan terus berupaya agar pemerintah bersedia memperpanjang kontrak TAC tersebut.

"Kita datang ke sini (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral/ DESDM) untuk meminta kepastian keputusan pemerintah tentang perpanjangan TAC tersebut," kata Longwell.

Meski mengancam tidak akan melakukan investasi tambahan, keinginan Exxon Cepu ini tidak bisa diterima begitu saja, baik oleh Pertamina sendiri maupun pemerintah Indonesia yang dalam hal ini diwakili Dewan Komisaris pemerintah untuk Pertamina (DKPP).

Pertamina, misalnya, jika keinginan Exxon Cepu tersebut ingin dipenuhi maka hasil yang didapatkan—setelah dipotong bagian pemerintah sebesar 65 persen—dibagi secara merata

antara Exxon Cepu dan Pertamina. Artinya, dari 35 persen bagian atas pengelolaan lapangan minyak itu dibagi menjadi 50 persen untuk Pertamina dan 50 persen untuk Exxon Cepu.

Selain itu, akibat sudah harus diperpanjangnya kontrak yang masa berakhirnya masih lama, Pertamina meminta agar Exxon Cepu memberikan bonus kepada Pertamina. Dan bonus tersebut harus dibayarkan di muka.

Dengan demikian, dari perhitungan bisnis maka bagi Pertamina diperpanjangnya kontrak tersebut pastilah akan menguntungkan, karena selain akan mendapatkan pemasukan dana juga memberikan kesempatan bagi BUMN Migas itu untuk mempersiapkan diri sebelum benar-benar mengambil alih lapangan minyak tersebut.

Sebab, menurut Direktur Hulu Pertamina, Iin Arifin Takhyan, walaupun saat ini pihaknya mampu mengelola lapangan minyak itu, tapi sesuai kontrak maka Pertamina baru akan mengambil lapangan itu setelah tahun 2010.

"Tentu kita (Pertamina) mampu untuk menggarapnya sendiri, tapi itu tidak mungkin dilakukan sekarang karena kontrak baru selesai tahun 2010, sebab dari hitungan bisnis tentu ini kurang menguntungkan," papar Iin.

### Ke Pertamina

Lapangan minyak Cepu pada awalnya merupakan wilayah kerja (WK) milik Pertamina. Hasil produksi minyak dari lapangan itu sebagian besar (65 persen) diberikan kepada negara, sedangkan Pertamina hanya mengambil sisanya (35 persen).

Tapi akibat kesulitan pendanaan dan adanya kebijakan pemerintah melalui Menteri Pertambangan dan Energi waktu itu (Ginandjar Kartasasmita), pemerintah menggariskan bahwa untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan swasta nasional ikut terlibat dalam bisnis migas nasional, pada 1990 PT Humpuss Patragas (milik Hutomo

Mandala Putra/Tommy Soeharto) menjadi kontraktor bantuan teknik (TAC) di lapangan minyak tersebut.

Akhirnya, 35 persen yang selama ini menjadi bagian Pertamina dari produksi minyak di lapangan itu dibagi menjadi 10 persen untuk Pertamina dan 25 persen untuk Humpuss sebagai kontraktor. Tapi pada tahun 2000, saham milik Humpuss di lapangan minyak itu dijual kepada PT ExxonMobil Oil yang kemudian diserahkan kepada anak perusahaannya, yaitu Mobil Cepu Ltd.

Setahun kemudian, perusahaan itu mempublikasikan bahwa cadangan minyak di lapangan Cepu sebanyak 250 juta barel, atau lebih kecil dari hasil kajian yang dilakukannya sendiri. Berdasarkan prakiraan Exxon Cepu, lapangan minyak yang kini dikelolanya itu memiliki total cadangan 735 juta barel minyak (meliputi cadangan *proven, probable*, serta *possible*), dan gas sebanyak 5,9 miliar kaki kubik.

Prakiraan ini lebih besar dari hasil kajian Lembaga Minyak dan Gas (Lemigas) yang memperkirakan total cadangan minyak di lapangan tersebut sekitar 500 juta barel dan gas 6,3 miliar kaki kubik. Sementara minyak yang sudah berhasil diproduksi Exxon Cepu dari blok ini baru mencapai setengahnya, atau sekitar 350 juta barel.

Mungkin karena pertimbangan itulah kemudian Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas yang juga anggota Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP), Kwik Kian Gie menolak jika kontrak tersebut harus diperpanjang.

Pasalnya, menurut dia, lapangan minyak yang jelas-jelas milik Pertamina itu harus dikuasai dan dikelola perusahaan bersangkutan, bukan justru diserahkan begitu saja kepada pihak asing. Tapi, pendapat Kwik ini tidak didukung anggota DKPP yang lain.

Dukungan terhadap keberatan Kwik justru secara tidak langsung datang dari DPR, khususnya Komisi VIII DPR,

Beberapa anggota dari komisi teknis yang menangani masalah pertambangan dan energi ini pun berpendapat senada dengan Kwik.

Anggota Komisi VIII DPR yang juga Wakil Ketua Subkomisi VIII Bidang Pertambangan dan Energi, Priyo Budi Santoso, misalnya. Dia berpendapat sebaiknya pemerintah (melalui DKPP) tidak perlu terburu-buru memberikan persetujuan atas perpanjangan kontrak tersebut. Sebab, menurut dia, selain belum saatnya kontrak itu untuk diperpanjang sekarang, juga perlu ada kajian yang mendalam mengenai cadangan minyak di blok tersebut.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Emir Moeis mengusulkan, sebaiknya blok minyak itu dikembalikan kepada Pertamina. Sebab dengan demikian, keuntungan yang selama ini diperoleh Exxon Cepu dari produksi minyak di blok tersebut dapat diambil BUMN migas tersebut.

"Sudah saatnya pemerintah memberikan prioritas pada Pertamina untuk mengelola lapangan Cepu, karena melalui perusahaan itulah nantinya anak cucu bangsa dapat menikmati sumber daya alamnya," ujar Emir.

Dengan adanya keberatan-keberatan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro sebagai Ketua DKPP kemudian menyatakan tidak akan mencampuri masalah itu dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pertamina untuk menyelesaikannya bersama pihak Exxon Cepu.

"Kontrak itu 'kan murni *business to business*, jadi harus diselesaikan secara *business to business*. Kita serahkan sepenuhnya agar Pertamina membicarakannya dengan pihak Exxon, karena itu bukan tugas Dewan Komisaris (Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina/ DKPP)," ujar Purnomo usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, beberapa waktu lalu.

(Eman Sanusi)

## GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIGAS	BISNIS INDONESIA	T.4	26-8-2002

# Indonesia butuh investasi US\$7 miliar untuk gas

BANDUNG (Bisnis): Indonesia membutuhkan dana investasi sedikitnya US\$7 miliar untuk eksplorasi dan eksploitasi gas bumi di berbagai lokasi sebagai substitusi minyak bumi yang volume produksinya terus menurun hingga sebesar 4% per tahun.

John S.Karamoy, preskom PT Medco Energi International Tbk, mengungkapkan konsumsi minyak bumi dan gas dalam negeri tumbuh sekitar 6% per tahun yang selama ini dipenuhi dari penjualan migas produksi sendiri dan impor.

Padahal, tambahnya, dari sisi produksi saat ini justru terjadi ketimpangan karena cenderung mengalami penurunan sekitar 4% per tahun akibat menurunnya cadangan minyak bumi.

"Yang menarik justru produksi gas bumi meningkat sehingga komoditas tersebut selayaknya didorong sebagai

substitusi minyak. Dengan cadangan yang masih cukup besar, gas bumi nantinya akan menjadi sumber energi sekaligus sumber devisa pengganti minyak bumi," ujarnya di sela-sela acara *Peringatan 40 tahun pendidikan Teknik Perminyakan ITB* akhir pekan lalu.

### Kebutuhan Asia Pasifik

John mengungkapkan selama ini cadangan gas terutama di wilayah Indonesia Timur dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar gas di Asia Pasifik dan Pantai Barat Amerika Serikat melalui pabrik pencairan di Tangguh Papua serta Luwuk.

Menurut dia, potensi kandungan gas bumi yang masih cukup besar saat ini berlokasi di Natuna, Kalitim, Sumatra, Jawa, Sulawesi, dan Papua, bisnis ini, tuturnya, serta cukup diminati investor karena biaya eksplorasi maupun eksploitasi gas bumi di Indonesia relatif lebih murah dibandingkan dengan negara lain.

Dia memproyeksikan dana investasi yang dibutuhkan untuk eksplorasi dan eksploitasi gas bumi itu sedikitnya

US\$7 miliar yang antara lain digunakan untuk menemukan cadangan gas baru, terutama di wilayah Indonesia Timur.

"Investasi tersebut juga dibutuhkan untuk membangun saluran pipa terpadu antara Aceh dan Jawa Timur serta pengembangan cadangan gas Natuna Timur untuk tujuan ekspor," paparnya.

Dia menjelaskan ladang gas bumi umumnya terletak pada lokasi yang dekat dengan permukaan bumi dan di kedalaman laut dangkal sehingga memudahkan eksplorasi maupun eksploitasi.

"Kondisi tersebut lebih menguntungkan lagi karena Indonesia memiliki nilai tambah berupa industri pendukung yang kuat serta SDM yang terampil," ujar John.

Namun, katanya, pemerintah perlu segera menyelesaikan persoalan menyangkut peraturan yang tumpang tindih di era otonomi daerah, gangguan keamanan, beban pajak yang semakin tinggi serta maraknya aksi unjuk rasa buruh karena berpotensi menyurutkan minat investor. (10)

## GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIGAS	BISNIS INDONESIA	T.4	26-8-2002

# Pertamina berharap temukan cadangan minyak di Madura.

JAKARTA (Bisnis): Pertamina bersama PT Medco Energi Internasional Tbk mengharapkan bisa menemukan cadangan minyak bumi 75 juta barel di lapangan Sumenep, di daratan Madura.

Direktur Hulu Pertamina Iin Arifin Takhyan mengatakan berdasarkan kegiatan seismik yang dilakukan telah diidentifikasi adanya cadangan minyak bumi di daerah itu.

"Diharapkan melalui pengeboran tiga sumur lagi bisa ditemukan cadangan minyak dan gas, dimana untuk minyak diperkirakan cadangannya bisa mencapai 75 juta barel," ujarnya kepada *Bisnis* akhir pekan lalu.

Sebelumnya, sejumlah kantor berita asing memberitakan bahwa Pertamina bersama Medco menemukan cadangan minyak di desa Lebbeng barat

Target produksi minyak, gas, & uap panas bumi Pertamina 2001-2002		
Jenis	2001	2002
Minyak bumi (bph)	68,523	54,676
Gas (juta kaki kubik/ hari)	684,36	816,41
Uap panas bumi (ton/hari)	26,03	28,22

Sumber: Pertamina

(*onshore*) Sumenep sebesar 75 juta barel.

### Bebaskan lahan

Penemuan itu diperoleh berdasarkan hasil penggalian yang dilakukan Pertamina dengan kedalaman 10.400 kaki atau seluas 3,5 km dari permukaan bumi. Disebutkan juga Pertamina telah membebaskan lahan 1,5 hektare dengan kompensasi sebesar Rp17,500 per meter persegi.

*Chief Financial Officer* PT Medco Energi International Tbk Sugiharto ketika diminta

konfirmasi mengenai berita itu mengatakan hingga saat ini perusahaannya belum mengetahui penemuan cadangan minyak sebanyak itu di lapangan yang terletak di desa Lebbeng barat (*onshore*) Sumenep.

"Saya belum dengar apa-apa, mungkin yang bisa memberi penjelasan Pertamina. Sebab kadang-kadang [beritanya] mengada-ada. Besok saya cek dulu," ujarnya ketika dihubungi *Bisnis* kemarin.

Menurut dia, pihaknya masih belum mau berkomentar karena dikhawatirkan akan terjadi salah penafsiran.

Iin menegaskan cadangan minyak sebanyak itu baru merupakan perkiraan dan bukan merupakan cadangan terbukti karena pengeboran baru dilakukan pada satu sumur. (zuf)

## GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIGAS	NERACA	3	26-8-2002

## ■ Gas Alam

## Kontrak LNG US\$ 12 Miliar, Modal Wapres Taiwan Berkunjung ke Indonesia

### Jakarta, NERACA

Kunjungan Wapres Taiwan, Lu Hsiu-lien, secara "sembunyi" ke Indonesia pekan lalu agaknya berkaitan dengan tawaran kontrak gas alam senilai US\$ 12 miliar.

Presiden Megawati Soekarnoputri dan suaminya dalam waktu dekat akan mengunjungi Taiwan, dengan tujuan utama pembahasan rencana pembelian gas alam Indonesia oleh Taiwan senilai US\$ 12 miliar, demikian surat kabar *China Times* melaporkan, Minggu.

Berita rencana kunjungan Me-ga ke Taiwan diungkapkan sehari setelah Wakil Presiden Taiwan (Annette) Lu Hsiu-lien menyelesaikan kunjungan empat harinya ke Indonesia yang disebutkannya "sukses besar."

Menurut *China Times*, pemerintahan Taipei bersedia menandatangani kontrak pembelian gas alam selama 25 tahun senilai 400 miliar dolar Taiwan (US\$ 12 miliar) yang akan digunakan untuk pembangkit listrik Da Tan, distrik Taoyuan, dekat Taipei.

Beberapa perusahaan asing lainnya, termasuk Exxon, Mobile dan Total, tengah bersaing untuk mendapatkan kontrak tersebut, namun Taiwan mempertimbangkan untuk memberikan kontrak tersebut ke Indonesia.

Wapres Lu sendiri dalam konferensi pers di Taipei, Minggu, dengan wajah berbinar-binar menyatakan kunjungannya ke Indonesia sebagai kemenangan diplomatik bagi Taipei, dan kemunduran bagi China, seperti dilaporkan kantor-kantor berita Barat.

"(Kunjungan) itu sukses besar," kata Lu dalam konferensi pers sehari setelah kembali dari lawatan empat hari ke Indonesia yang sempat membuat Cina marah.

"Pihak Beijing lah yang sungguh-sungguh mengalami kemunduran," kata Lu, yang selama ini

dibenci pihak Daratan karena pandangan-pandangannya yang sangat prokemerdekaan.

Lu mengatakan ia mengetahui ada seorang pejabat Cina yang menelepon mitranya di Indonesia dan menyatakan ancaman akan memutuskan hubungan diplomatik akibat kunjungannya tersebut.

Lu menggambarkan kunjungannya ke Indonesia sebagai sesuatu yang "sangat sulit dan rahasia" dan "pertempuran diplomasi tanpa suara tembakan senjata."

Saat tiba mendadak di Jakarta Rabu menjelang tengah hari, Wapres Lu tidak diizinkan keluar ruang VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta, namun kemudian ia terbang ke Bali untuk "berwisata".

### Kepalsuan Mutlak

Jurubicara Kemlu China, Kong Quan, seperti dilaporkan surat kabar resmi *Renmin Ribao (Harian Rakyat)*, Minggu, mengatakan aktivitas Lu selama berada di Indonesia hanyalah "kepalsuan mutlak".

"Fakta-fakta menunjukkan bahwa Lu itu seorang yang tidak diterima (persona non grata) dan tak ada jalan kemerdekaan Taiwan akan berhasil," kata jubar Kong.

Saat tiba kembali di Jakarta dari Bali pertengahan pekan ini, Lu masih terlihat memperoleh perlakuan layaknya tamu negara penting.

Tuan rumah menyediakan kendaraan penjemput khusus dan membawa masuk tamu dari Taiwan itu dengan iring-iringan kendaraan berpengawasan khusus dan bersirene meski tanpa tanda-tanda kenegaraannya.

Meski tak ada publikasi, Wapres Lu selama di Jakarta dilaporkan bertemu dengan Menteri

Negara Lingkungan Hidup Nabil Makarim yang teman kuliahnya di Amerika, dan juga dengan Menteri Tenaga Kerja, Jacob Nuwa Wea.

Pers Taiwan bahkan mengungkapkan Wapres Lu juga diterima secara diam-diam oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, di mana dalam kesempatan itu pemimpin Indonesia tersebut menyatakan setuju akan mengunjungi Taiwan.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Rakyat Cina dalam suatu pernyataannya hari Jumat menuduh Lu berusaha memecah belah China dengan kunjungannya ke Indonesia.

Langkah Lu tersebut akan "meningkatkan ketegangan antar kedua sisi Selat Taiwan," demikian pernyataan pemerintah Cina itu.

Menteri Luar Negeri RI Hasan Wirayudha kepada pers hari Kamis mengatakan kunjungan pejabat Taiwan itu hanya untuk tujuan wisata, dan tidak ada jadwal pembicaraan dengan pejabat pemerintah Indonesia.

Menlu Hasan, yang dalam pernyataannya kembali menegaskan kebijaksanaan dasar pengakuan hanya kepada Beijing (One-China policy), mengakui Pemerintah RRC melalui kedubesnya di Jakarta memprotes kunjungan Wapres Lu.

### Megawati Kecewa?

Persoalan kunjungan Wapres Lu ke Indonesia, kata seorang pengamat di Jakarta, agaknya menunjukkan cara pemerintahan Presiden Megawati menunjukkan kejengkelannya terhadap Beijing. Presiden Megawati, beberapa saat setelah terpilih, memutuskan menjadikan Cina sebagai salah satu negara pertama yang akan dikunjunginya secara resmi.

Saat kunjungan, kemesraan hubungan Jakarta-Beijing tercermin

dari isyarat sangat kuat: Megawati berdansa dengan Presiden Jiang Zemin waktu acara makan malam resmi di Renmin Da Huitang (Balai Agung Rakyat).

Namun lebih dari itu, selama kunjungan dihembuskan pula kesediaan Cina untuk memenangkan Indonesia dalam pengadaan kontrak gas alam untuk Provinsi Guangdong, bernilai US\$ 13 miliar. Tapi, nyatanya, kontrak LNG tersebut dimenangkan oleh Australia dan yang mencatatnya sebagai kontrak ekspor terbesar dalam sejarah negara Kanguru itu dan menjadi kemenangan politis di dalam negeri bagi PM John Howard yang sebelumnya juga turut melobi Beijing.

Pemerintah Cina di Beijing dan Pemerintah Taiwan di Taipei dalam waktu 30 tahun terakhir terus terlibat dalam perang diplomasi yang bertujuan merebut pengakuan negara lain. Kedua belah pihak menggunakan berbagai strategi, termasuk pemberian bantuan keuangan.

Bagi Beijing, Pemerintah Taiwan bukanlah suatu pemerintahan dan hanya sebuah provinsinya yang membelot. Catatan sejarah menunjukkan, Pemerintahan Taiwan merupakan kelanjutan dari pemerintahan nasionalis Koumintang yang dipimpin Jenderal Chiang Kai-shek yang berhasil dikalahkan kekuatan komunis Kouchantang dipimpin Mao Zedong di tahun 1949.

Jenderal Chiang Kai-shek membawa lari sisa pasukannya menyeberang ke Pulau Taiwan dan membentuk pemerintahan nasionalis ketika itu.

Kini, setelah setengah abad lebih berlalu, Wapres Taiwan melawat ke Indonesia, dengan maksud dan misi yang boleh jadi mengundang pertanyaan di berbagai kalangan. (ant)

# GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIGAS	GATRA	126	1-9-2002

## Harga Minyak Melonjak

HARGA minyak dunia naik tajam sepanjang pekan lalu. Kenaikan itu karena adanya keraguan akan keamanan suplai emas hitam itu dari Timur Tengah, menyusul kecemasan timbulnya konflik militer antara Amerika Serikat dan Irak. Ini bisa menimbulkan kekacauan pasokan minyak di Timur Tengah, yang menyimpan dua pertiga cadangan minyak dunia. Minyak mentah

Brent patokan internasional naik 48 sen menjadi US\$ 29,36 per barel.

Organisasi Negara Peng ekspor Minyak (OPEC) akan mempertahankan produksi resmi pada tingkat terendah selama satu dasawarsa tahun ini, membantu harga minyak mentah naik hampir 50 persen, meskipun permintaan bahan bakar seret karena terpuruknya ekonomi.

Kenaikan ini, kata Direktur Danareksa Sekuritas, Raden Pardede, sebenarnya tak berpengaruh banyak pada pemerintah pusat, yang mengasumsikan harga US\$ 22 di APBN. Hal ini menarik karena pengeluaran pemerintah untuk membeli minyak justru makin besar, sementara pendapatan harus dibagi ke daerah-daerah. Pemerintah baru akan terbantu kalau subsidi dikurangi.

## GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIGAS	REPUBLIKA	4	26-8-2002

### Pertamina Butuh 660 Juta Dolar AS

JAKARTA — Untuk mengembangkan lapangan Cepu yang terletak di Jawa Timur, Pertamina membutuhkan modal investasi sebesar 660 juta dolar AS atau setara dengan Rp 6,5 triliun.

Dari kajian Lemigas disebutkan, setelah ladang itu dikembalikan ke Pertamina pada 2010, maka setahun kemudian investasi yang diperlukan sebesar 35 juta dolar AS. Pada tahun 2012, modal yang diperlukan bertambah menjadi 254 juta dolar AS.

Memasuki 2013, Pertamina harus menginvestasikan 257 juta dolar AS. Baru pada tahun 2014, investasi yang harus dikeluarkan menjadi 114 juta dolar AS. Setelah itu, perusahaan migas milik negara itu menikmati pendapatan dari produksi minyak yang mencapai 150 ribu barel per hari (bph).

Hingga tahun 2030, Pertamina akan memperoleh pendapatan 2,361 miliar dolar AS. Ini belum termasuk hitungan produksi minyak setelah tahun 2030. Peralnya, Lemigas mengkaji hitung-hitungan tersebut hanya sampai 2030.

Pemerintah meragukan kemampuan Pertamina memiliki dana investasi tersebut. Namun, seperti ditegaskan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, mengutip pernyataan Dirut Pertamina Baihaki Hakim, banyak bank yang antri memberikan pinjaman kepada Pertamina.

Kwik dan Baihaki memang tidak berlebihan. Dari hasil kajian ExxonMobil saja, cadangan minyak lapangan Cepu mencapai 2,2 miliar barel. Dari jumlah itu, 735 juta diantaranya bisa diproduksi. Untuk kandungan gas, terdapat 11,767 triliun kaki kubik (tcf) dan yang bisa diangkat sebesar 5,92 triliun kaki kubik.

Karena itu, Kwik sempat mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro soal ketidaksetujuannya untuk memperpanjang kontrak ExxonMobil. Surat itu berkop Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tanggal 15 Agustus 2002 nomor 3665/M.PPN/08/2002.

Inti surat itu, Kwik menyatakan ketidaksetujuannya untuk memperpanjang kontrak ExxonMobil yang akan berakhir 2010. Kwik mengatakan sebaiknya eksplorasi dan pengelolaan dilakukan oleh putra-putri Indonesia.

Apalagi, katanya, keuntungan yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan dikelola sendiri dibandingkan oleh perusahaan asing.

Sejauh ini, pemerintah sendiri sudah memutuskan untuk memperpanjang kontrak ExxonMobil sampai 2030. Alasannya, kata Direktur Hulu Pertamina lin Arifin Takhyhan, perpanjangan kontrak itu lebih menguntungkan bagi Pertamina. Namun, katanya, dengan sejumlah syarat.

lin tidak menjelaskan keuntungan apa saja yang dimaksud jika kontrak itu diperpanjang. Dia hanya mengatakan ExxonMobil harus membayar dana kompensasi dan pembagian saham *working interest* (WI) 50:50. Atau sesuai dengan kajian Lemigas alternatif kedua.

ExxonMobil sudah menginvestasikan 380 juta dolar AS di Cepu dan sampai saat ini belum kembali. Oleh karena itu, mereka meminta perpanjangan kontrak untuk bisa mengembalikan investasi itu. Kwik sendiri tetap menolak perpanjangan dengan alasan apapun. Kalau ada investor rugi, kata dia, wajar saja dalam bisnis. "Pedagang Glodok saja tahu," katanya. ■ erd

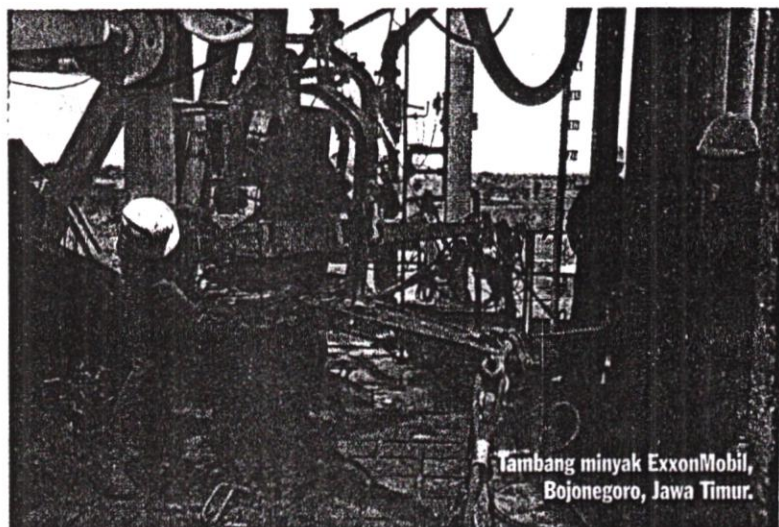
## GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MLGAS	TEMPO	123	1-9-2002

■ Kontrak Minyak Cepu

# Ribut-Ribut Kontrak Exxon

Terjadi pro-kontra seputar usul perpanjangan kontrak Exxon. Kwik Kian Gie berpendapat, kalau mau hasil lebih besar, eksploitasi minyak Cepu harus ditangani sendiri oleh Indonesia.



Tambang minyak ExxonMobil, Bojonegoro, Jawa Timur.

TEMPO/MAHANZAR

**K**WIK Kian Gie menggebrak lagi dan kali ini sasarannya adalah Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP), tempat ia sendiri duduk sebagai salah satu anggotanya. Melalui voting, DKPP menyetujui usul perpanjangan kontrak yang diajukan ExxonMobil Oil Indonesia untuk eksploitasi ladang minyak di Cepu, Jawa Tengah. Pendeknya, Kwik kalah suara dalam rapat 14 Agustus itu.

Tiga anggota DKPP yang lain—Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri Keuangan Boediono, dan Menteri Sekretaris Negara Bambang Kesowo—menyetujui perpanjangan kontrak Exxon di Cepu selama 20 tahun lagi sampai tahun 2030. Padahal kontrak yang pertama baru akan habis tahun 2010. Keputusan itu jelas kurang menguntungkan, dan Kwik tentu tidak bisa diam saja.

Sehari kemudian ia mengirim surat protes kepada Ketua DKPP, yakni Menteri Purnomo Yusgiantoro. Menurut Kwik, Indonesia akan ditertawakan dunia karena menyerahkan cadangan minyak 735 juta barel kepada asing. "Meraka akan bilang kita goblok," katanya. Kwik juga akan menyurati Presiden Megawati Sukarnoputri. Kalau Presiden setuju memperpanjang? "Saya tak bisa berbuat apa-apa, *wong* dia bos saya," ujarnya.

Namun, Purnomo membantah Kwik. Katanya, pemerintah menyerahkan keputusan soal itu kepada Pertamina. "Biarkan Pertamina dan Exxon yang berunding," ujar menteri yang baru saja terpukul karena Indonesia gagal memenangkan kontrak pemasokan gas Tangguh bagi RRC itu. Iming-iming uang miliaran dolar pun raib seketika.

Setelah kehilangan peluang besar itu, tampaknya tiga menteri tersebut tidak mau ambil risiko. Usul Exxon pun di-

setujui—walaupun usul perpanjangan ini masih terlalu dini. Yang dipertimbangkan barangkali cuma jatah pemerintah sebesar 65 persen. Sisanya yang 25 persen dipegang Exxon, dan Pertamina kebagian 10 persen.

Ladang minyak Cepu memang sebuah kontroversi. Pada tahun 1990, pengelolaan ladang milik Pertamina itu diserahkan kepada Humpuss Patragas dengan kontrak 20 tahun. Tapi hasilnya tak begitu banyak. Padahal utang Humpuss mesti segera dibayar. Pada 1999, Humpuss Patragas masuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan utang macet sekitar US\$ 25 juta. Setahun kemudian, ExxonMobil melalui Mobil Cepu Ltd. mengambil alih ladang ini setelah membayar kompensasi sekitar US\$ 90 juta kepada Humpuss. Tapi, begitu Exxon masuk, tiba-tiba majalah perminyakan *Upstream* (edisi Januari 2000) memberitakan bahwa ada cadangan minyak sebanyak 2 miliar barel di Cepu.

Adakah itu berita bohong? Ternyata tidak juga. Soalnya, titik-titik pengeboran Humpuss dan Exxon berbeda. Exxon baru menemukan cadangan minyak yang besar di Banyu Urip, Bojonegoro, Jawa Timur. Wilayah ini masih termasuk dalam lahan konsesinya seluas 1.700 kilometer persegi. Exxon sendiri baru belakangan menyatakan bahwa ada cadangan yang jumlahnya diperkirakan sekitar 250 juta barel.

Tapi, berdasarkan data dari seorang pejabat pemerintah, cadangan minyak versi Exxon mencapai 735 juta barel plus cadangan gas 5,9 triliun kaki kubik (TCF). Versi Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) sedikit lebih rendah, yaitu 458 juta barel minyak dan 6,3 TCF gas. Ini jelas rezeki nomplok bagi Exxon, yang bisnisnya memang sedang lesu.

Sebagaimana diketahui, produksi gas ExxonMobil Oil Indonesia di ladang gas

Arun, Aceh, sangat menurun. Sementara pada tahun 1999 Exxon memproduksi 800 miliar standar kaki kubik, tahun lalu tinggal sepertiganya. Produksi minyak mentahnya juga turun. Tahun lalu, Exxon cuma memompa 13.400 barel per hari—turun 52,5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena itu, Exxon berusaha mendongkrak kinerjanya di Cepu dan berencana memproduksi 25 ribu barel per hari yang akan ditingkatkan sampai 150 ribu barel per hari. Investasinya US\$ 1,2 miliar—US\$ 380 juta di antaranya sudah direalisasi.

Siapa yang tidak gemas membayangkan jutaan dolar yang bakal diraup Exxon? Bahkan, menurut Kwik, pendapatan yang bisa digali dari Cepu jauh lebih besar jika dikuasai Pertamina. Paling tidak, hasilnya bisa mencapai US\$ 15 miliar (Rp 130 triliun). "Pertamina sanggup menggarap proyek itu," katanya. Lagi pula, yang harus dilakukan pemerintah hanyalah tidak memperpanjang kontrak, bukan memutuskan kontrak di tengah jalan.

Pertamina sendiri bersikap lain. Menurut juru bicaranya, Ridwan Nyak Baik, Pertamina memiliki dua syarat, yakni porsi saham Pertamina ditambah dari 10 persen menjadi 17,5 persen dan Exxon membayar kompensasi dalam bentuk tunai.

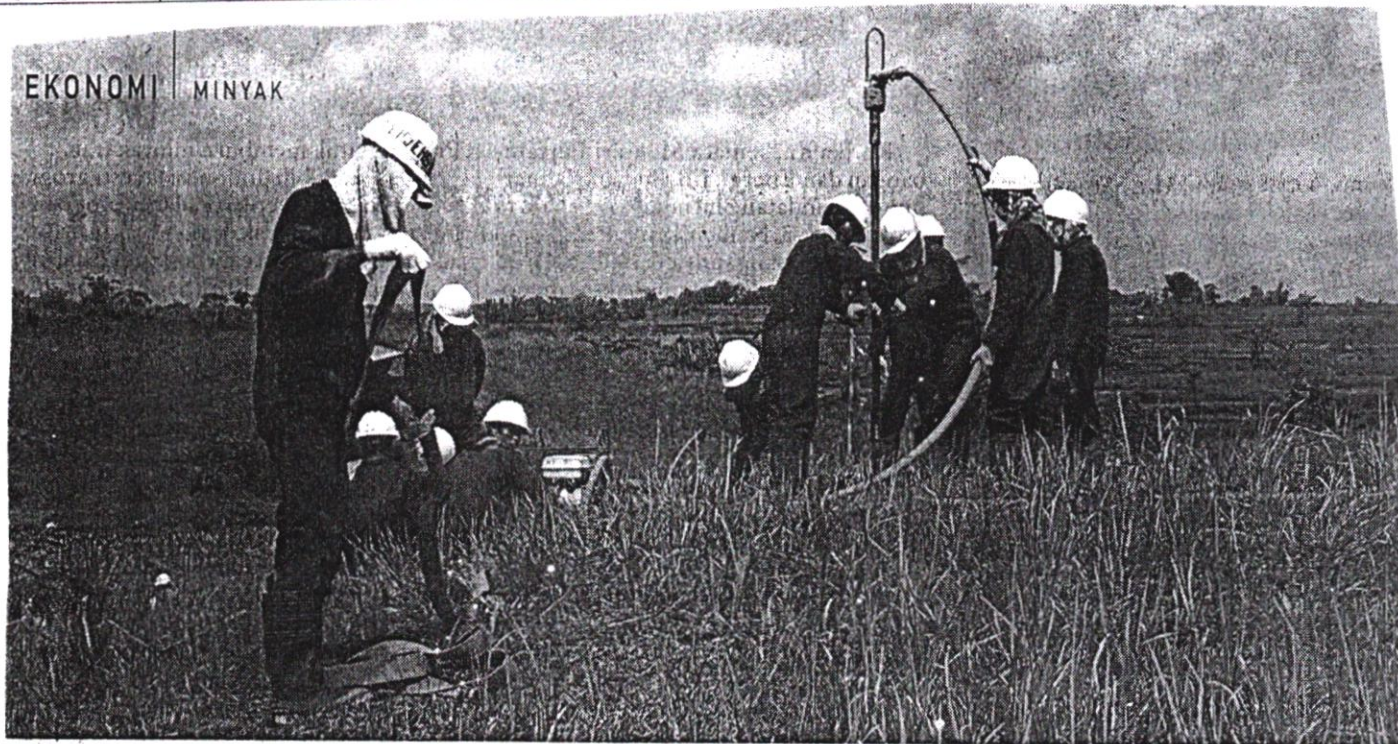
Yang menarik, kali ini pengamat minyak Kurtubi sependapat dengan Kwik. Menurut dia, produksi minyak dunia akan mencapai puncaknya pada tahun 2020. Setelah itu, produksi menurun dan harga minyak lalu melonjak di atas US\$ 28-30 per barel. "Apa enggak sayang ladang itu mau diserahkan ke pihak lain?" katanya, tanpa mengatakan betapa goblok Indonesia.

M. Taufiqurrohmah,

Agus S. Riyanto, Dwi Arjanto, D.A. Candraningrum (TNR)

## GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARTI/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIBAS	GATRA	74	31-8-2002



KAWASAN EXXON CEPU; URUSAN GANTI RUGI TAK JADI PERHATIAN

### Hanya Getah untuk Warga

ExxonMobil diperkirakan mendapat tambahan kontrak bantuan teknis di Blok Cepu sampai 2030. Berbuntut negatif sikap pemerintah yang ogah-ogahan melibatkan daerah.

**S**EMBARI membentangkan beragam poster, ribuan warga meneriakkan yel-yel mengecam ExxonMobil. Mereka merangsek lokasi pemboran minyak Banyu Urip, Bojonegoro, Jawa Timur, yang digarap raksasa minyak Amerika itu, Kamis dua pekan lalu. Jalan menuju Banyu Urip diblokir dengan potongan pohon pisang.

Demo besar yang melibatkan masyarakat sembilan desa itu digelar untuk menyambut keputusan Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP), sehari sebelumnya, yang menyetujui perpanjangan kontrak ExxonMobil Oil Indonesia — selanjutnya disebut Exxon — di Blok Cepu, sampai 2030. DKPP terdiri dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro (ketua), Menteri Keuangan Boediono, Menteri Perencanaan Pembangunan Kwik Kian Gie, Menteri BUMN Laksamana Sukardi, Sekretaris Negara Bambang Kesowo, dan Meizar Rahman (sekretaris, dari kantor Menteri Energi).

Dalam rapat itu, Bambang Kesowo tak hadir. Sedangkan Laksamana diwakili stafnya. Kecuali Kwik, peserta rapat menyetujui permintaan Exxon. Karena Kwik *ngotot*, keputusan diambil lewat voting. Meski kalah, ia *legowo*.

Belakangan, setelah diberitahu stafnya, pemikir dari PDI Perjuangan itu protes keras. Sesuai dengan Undang-Undang Pertamina, pengambilan keputusan harus lewat musyawarah mufakat. Kalau mentok, diserahkan ke presiden. Boleh jadi, atas protes keras Kwik itu, keputusan DKPP akhirnya dianulir. Kini, bola panas Cepu berada di kaki Presiden Megawati Soekarnoputri.

Tak jelas, kapan presiden bakal mengemukakan palunya. Bagi Janiman, penduduk Desa Mojodelik, Bojonegoro, kemenangan Exxon itu cuma soal waktu. Apalagi, konglomerat minyak itu berasal dari "negeri Paman Sam": negara *superpower* yang ia ketahui paling gatal dalam mencampuri urusan negara lain, termasuk di bidang ekonomi. Sebagai negara paling berpengaruh, Pemerintah Amerika tentu tak ingin Exxon gagal menguatkan cengkramannya di Cepu.

Di mata Janiman, yang rumahnya cuma berjarak sekitar dua kilometer dari sumur Banyu Urip, Exxon tak punya reputasi bagus. Perusahaan itu ogah-ogahan memberesi ganti rugi tanah penduduk. "Sampai sekarang tanah saya belum dibayar," kata kakek berusia 67 tahun itu

kepada Maman Ghozi dari GATRA.

Menurut Janiman, pada 1997, ketika hak pengelolaan Banyu Urip masih dikuasai Tommy Soeharto lewat PT Humpuss Patragas, setengah hektare tanahnya kena proyek. Bersama delapan penduduk Mojodelik lainnya, ia mendapat kompensasi Rp 5.000 per meter persegi. Duit itu bukan untuk membeli tanah, melainkan mengganti rusaknya lahan yang dipakai uji coba pengeboran. Kata anak buah Tommy waktu itu, kalau terbukti ditemukan minyak, tanah tersebut akan dibeli Rp 50.000 per meter persegi.

Minyak memang ditemukan. Malah, kabarnya Banyu Urip menjadi sumur andalan yang diprediksi paling banyak memproduksi minyak. Tapi, urusan ganti rugi tak menjadi perhatian lagi. Janiman, dan penduduk sekitar proyek, cuma bisa gigit jari. Padahal, menurut pengakuan dia, saban tahun mereka tetap membayar pajak.

Ketika Blok Cepu berpindah tangan ke Mobil Cepu Ltd, raksasa minyak Amerika yang kemudian merger dengan Exxon, Janiman bersama kawan-kawannya mengajukan tuntutan kepada bos baru. Eh, *sami mawon*. Inilah yang kemudian diperjuangkan Janiman, dan ribuan warga, dalam demonya pada Kamis dua pekan lalu.

Di Kabupaten Bojonegoro, saat ini terdapat dua lokasi pengeboran penting, Banyu Urip dan Jambaran Sawit, sekitar 35 kilometer barat daya ibu kota kabupaten. Lokasi keduanya berdekatan. Luasnya masing-masing sekitar tiga hektare. Kedua lapangan minyak itu terletak di tengah ladang gersang. Permukiman penduduk paling dekat dua kilometer.

WANASAN

# GUNTINGAN BERITA

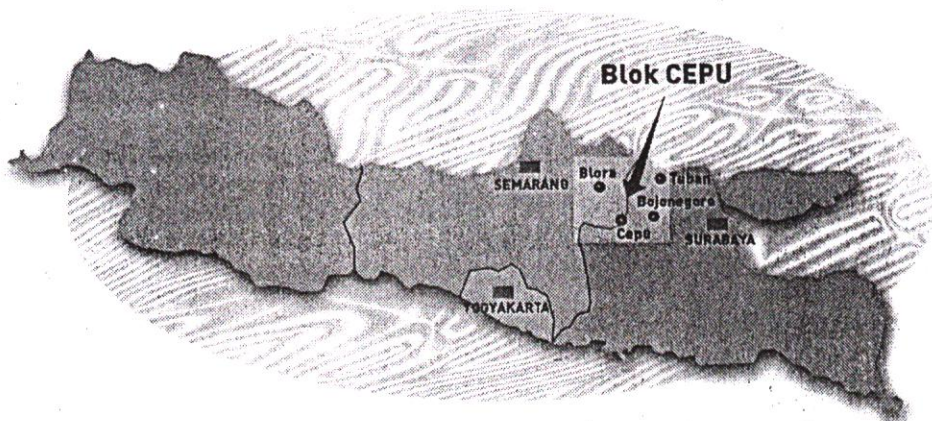
CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
----------	--------------------------------------	---------	---------

Masih ada puluhan lubang lain yang tengah dieksplorasi. Sumur Blok Cepu yang menempati areal seismik seluas 1.220 kilometer persegi itu berada di perbatasan tiga kabupaten, Blora (Jawa Tengah) serta Bojonegoro dan Tuban (keduanya di Jawa Timur). Dengan posisi Blok Cepu seperti itu, Exxon bukan hanya berhadapan dengan penduduk yang tinggal di sekitar sumur, melainkan juga dengan ketiga pemerintah dan DPRD kabupaten tersebut.

Tengok saja di Blora. Maret lalu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Cepu. Pansus anyar ini bertugas memelototi harta karun minyak di Blok Cepu, dengan awak 17 anggota DPRD. Menurut Haryono, ketua pansus, meski urusan kontrak Mobil Cepu menjadi urusan pusat, dalam era otonomi ini daerah tak bisa diabaikan. "Soalnya, sebagian cadangan minyak itu berada di wilayah kami," katanya.

Selama ini, Blora cuma memperoleh bagi hasil minyak Rp 700 juta per tahun dari produksi minyak Pertamina yang mencapai 260 barel per hari. Bagi hasil ini disalurkan lewat dana alokasi umum. Dengan adanya pansus itu, Blora berharap dapat bagian lebih besar lagi.

Sejauh ini, kata Haryono, pansus memang belum mengutak-atik ke bagi hasil. Ia baru melakukannya kelak, saat Exxon mulai berproduksi. Ia tak ingin masyarakat



Blora cuma jadi penonton. "Ibarat buah nangka, jangan sampai kami cuma kebagian getahnya, sedangkan buahnya dimakan orang lain," ujarnya kepada GATRA.

Kalau di Blora baru sebatas pansus, Bojonegoro sudah melangkah lebih jauh. Menurut Muntoro, Kepala Humas Kabupaten Bojonegoro, April lalu pihaknya membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) baru bernama PT Dharma Asri Sejahtera. Perusahaan ini mulai beroperasi awal tahun depan. BUMD ini, antara lain, bergerak di bidang angkutan minyak dan retribusi.

Soalnya, kalau minyaknya sudah mulai ditimba, Blok Cepu pasti butuh angkutan minyak. Saban hari, banyak kendaraan ke-

luar masuk. "Kami tak ingin seperti Aceh, yang masyarakatnya tetap miskin meski kaya gas," kata Ony Supriadi, Wakil Ketua Komisi C (Keuangan) DPRD Bojonegoro. Kebetulan, dari perut Aceh, Exxon menengeruk gas dalam jumlah besar selama puluhan tahun.

Reaksi daerah itu tampaknya baru permulaan. Di Riau dan Kalimantan Timur, ancaman seperti ini terbukti amat mempengaruhi kelangsungan produksi perusahaan tambang. ■

SAIFUL ANAM,  
OKE INDRAYANA TRIANTO,  
SYAMSUL HIDAYAT (SEMARANG), DAN  
NURUL FITRIYAH (SURABAYA)

FRITZ PELENGKAHU

# GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIGAS	GATRA	75	31-8-2002

## SEJARAH MINYAK CEPU

### 1860:

Pada akhir abad ke-18, Ardian Stoop, seorang sarjana Belanda, menemukan rekahan tanah mengeluarkan cairan hitam di sekitar Cepu. Setelah diteliti bertahun-tahun, temuannya itu lantas ditindaklanjuti dengan eksplorasi pertama pada 1860 di Desa Panolan.

### 1945:

Setelah merdeka sampai masa rezim Orde Baru, ladang Cepu pernah dikelola Pertamina dan Shell.

### 1990:

Ada temuan baru, cadangan minyak Cepu yang sebelumnya diperkirakan sudah menipis ternyata masih melimpah. Informasi ini masuk ke Cendana.

Pada Agustus 1990, melalui anak perusahaannya, PT Humpuss Patragas, Tommy Soeharto masuk. Humpuss Patragas menekan *technical assis-*



TOMMY SOEHARTO

DOK. GATRA/DIMAS ARDIAN

*tant contract* selama 20 tahun. Kontrak mensyaratkan, Humpuss Patragas tak boleh menjual kepada asing.

### 1997:

Atas desakan Humpuss, Pertamina menyetujui amandemen kontrak. Ketentuan baru itu membolehkan Tommy menjual sahamnya ke pihak asing. Tommy lantas merangkul Ampolex dari Australia, dengan penyertaan saham 49%. Saham Ampolex tak bertahan lama karena kemudian dibeli oleh ExxonMobil.

### 1998:

Sampai 1998, Tommy sudah mengebor 15 sumur. Yang paling menjanjikan sumur Ngolobo Utara I. Pada kedalaman sekitar 2.000 meter, dihasilkan minyak sekitar 1.200 barel per hari. Sayangnya, Tommy tak bisa melanjutkan proyeknya karena grup perusahaannya oleng dihantam krisis. Beberapa perusahaannya lantas masuk BPPN karena terbelit utang BLBI.

### 2000:

Atas rekomendasi BPPN, pada Juni 2000 Tommy menjual 51% sisa sahamnya kepada ExxonMobil. Praktis, Exxon menguasai 100%

Blok Cepu yang sebelumnya dikuasai Humpuss.

### 2001:

Besarnya harta karun Cepu makin meyakinkan setelah majalah perminyakan *Upstream* melansir bahwa cadangan minyak di Blok Cepu sebanyak 300 juta sampai 2 milyar barel. Setelah itu, mulai berembus kabar bahwa Exxon berminat memperpanjang kontraknya

### 2002:

Exxon secara resmi mengajukan perpanjangan kontrak 20 tahun lagi. Kwik Kian Gie menolak. Niat Exxon nyaris berhasil setelah DKPP merestui perpanjangan kontraknya lewat voting. Keputusan ini mentah lagi karena dinilai melanggar undang-undang. Di tengah simpang siur itu, Pertamina menyatakan kesiapannya menggarap. Kini, bola di kaki Megawati. □



KWIK KIAN GIE

DOK. GATRA/DIMAS ARDIAN

## GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIGAS	REPUBLIKA	4	26-8-2002

# Rugi, Perpanjang Kontrak ExxonMobil

Indonesia justru lebih menikmati hasil ladang minyak di Cepu, jika dikelola sendiri oleh perusahaan nasional.

**L**embaga Minyak dan Gas (Lemigas) melakukan pengkajian terhadap hitung-hitungan diperpanjang atau tidaknya kontrak ExxonMobil di Cepu. Dari tiga alternatif yang disodorkan Lemigas, diketahui kalau perpanjangan kontrak ExxonMobil hanya akan merugikan Indonesia secara ekono-

mi.

Dari dokumen hasil kajian Lemigas yang diperoleh *Republika* akhir pekan lalu, disimpulkan bahwa Indonesia, justru lebih menikmati hasil ladang minyak Cepu jika dikelola sendiri oleh perusahaan nasional. Terutama bila pengelolaan itu dilaksanakan oleh Pertamina.

Jika pada tahun 2010 saat

kontrak ExxonMobil selesai dan dikembalikan ke Pertamina, potensi pendapatan yang diperoleh negara Indonesia mencapai 6,782 miliar dolar AS. Dari jumlah itu dibagi tiga untuk pemerintah pusat (3,966 miliar dolar AS), pemerintah daerah 456 juta dolar AS, dan Pertamina sebesar 2,361 miliar dolar AS.

Perhitungan pendapatan tersebut belum termasuk produksi minyak setelah tahun 2030. Pasalnya, menurut sumber *Republika* yang dekat dengan kalangan energi dan sumber daya mineral, produksi minyak Cepu terus berlanjut beberapa tahun kemudian setelah 2030.

Dalam dokumen Lemigas disebutkan tiga alternatif penyelesaian masalah perpanjangan kontrak ExxonMobil di lapangan Sukowati, Cepu, pasca 2010. Pertama, ladang itu dikembalikan kepada Pertamina dengan pembagian pendapatan 40 persen untuk Pertamina dan 60 persen untuk pemerintah. Untuk *working interest* (WI), 100 persen dipegang Pertamina.

Dalam hal ini, ExxonMobil tidak lagi ikut operasi dan tidak memiliki saham karena memang sudah kewajibannya mengembalikan ladang itu kepada pemiliknya, yakni Pertamina, pada tahun 2010. Pendapatan yang diperoleh seperti tertulis di atas, akan seluruhnya masuk ke Indonesia dan tidak seperti sekarang.

Sumber *Republika* mengatakan Pertamina menginginkan alternatif ini. Per-

usahaan migas negara itu, kata dia, tidak memiliki kendala pendanaan dan sumber daya serta teknologi untuk mengelolanya. "Saya heran jika ada pejabat pemerintah yang ingin memperpanjang kontrak Exxon. Tentu ada apa-apanya," kata sumber tersebut.

Alternatif kedua, Lemigas mengusulkan pembagian saham 65 persen untuk Pertamina, dan 35 persen untuk ExxonMobil. Dengan alternatif ini, pajak ditanggung Pertamina sebesar 35 persen. Sedangkan *working interest* dibagi dua, yakni 50:50 untuk Pertamina dan ExxonMobil. Pertamina memperoleh uang kompensasi dari perusahaan minyak Amerika Serikat itu.

Dengan perhitungan ini, pemerintah pusat memperoleh 4,5 miliar dolar AS dan Pertamina 2,579 miliar dolar AS. Sementara ExxonMobil memperoleh 1,837 miliar dolar AS. Dari bagian pemerintah, pemerintah daerah memperoleh 76 juta dolar AS, sedangkan pusat 4,445 miliar dolar AS.

Alternatif ketiga, pembagian saham tetap 65:35 untuk Pertamina dan pajak 35 persen ditanggung bagian Pertamina. Untuk WI, ExxonMobil memperoleh 78 persen, sedangkan Pertamina 22 persen. Dan itu pun harus disertai modal investasi yang masuk meski sebetulnya ladang itu milik Pertamina.

Hasilnya, Indonesia hanya memperoleh 6,27 miliar dolar AS. Dari jumlah itu, pemerintah pusat mendapat

4,437 miliar dolar AS, pemerintah daerah hanya 85 juta dolar AS, dan Pertamina 1,748 miliar dolar AS. Beberapa yang diraih ExxonMobil? Perusahaan minyak terbesar di dunia itu mengeruk 2,667 miliar dolar AS. Karena itu secara ekonomi, jika kontrak tersebut di perpanjang Indonesia rugi. ■ **erd**

### ALTERNATIF KEEKONOMIAN\*

Alternatif	Pra-2010	Pasca-2010
1	Lapangan Sukowati Split EM:PTM 35:65 Pemerintah: 60% dari bagian PTM WI (EM:PTM): 100:0	Full Field Development Pertamina Own Operation Net Split PTM: Pem: 40:60 WI (PTM = 100%)
2	Full Field Development Split EM:PTM = 35:65 Pajak EM: 48% Pemerintah: 60% dari bagian PTM WI (EM:PTM) = 100:0	Full Field Development Split EM:PTM = 35:65 Pajak PTM: 35% WI (EM:PTM) = 50:50 Kompensasi
3	Full Field Development Split EM:PTM = 35:65 Pemerintah: 60% dari bagian PTM WI (EM:PTM) = 78:22	Full Field Development Split EM:PTM = 35:65 Pajak PTM: 35% WI (EM:PTM) = 78:22

sumber: dokumen Lemigas

PTM = Pertamina

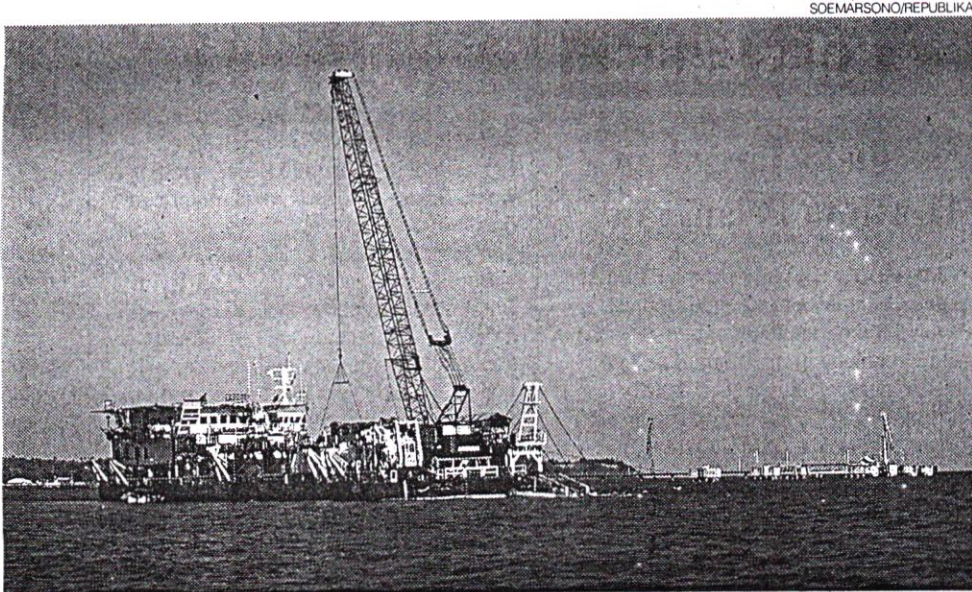
EM = ExxonMobil

WI = Working Interest

\* Kontrak EM di Cepu selesai 2010 dan harus dikembalikan ke Pertamina. Pertamina yang menentukan diperpanjang atau tidaknya kontrak itu, bukan EM.

# GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL



**TAK TERPENGARUH:** Kegiatan ExxonMobil di Cepu yang harusnya berakhir tahun 2010 tak terpengaruh isu perpanjangan kontrak proyek dan diributkan banyak pihak.

## GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIGAS	INVESTOR	12	24-8-2002

# Tangguh Sumbang Pendapatan Masyarakat Lokal US\$ 1,1 Miliar

### Jakarta, Investor

Tak ada rotan, akar pun jadi. Tak dapat Guangdong, Fujian pun lumayan. Meski Indonesia gagal memenangkan tender pasokan LNG ke Guangdong dari lapangan Tangguh Irian Jaya, namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Irian Jaya tetap menyambut positif proyek pengiriman LNG ke Fujian. Pasalnya, keberadaan proyek Tangguh tersebut berpotensi memberikan pendapatan untuk masyarakat lokal sebesar 1,1 miliar dolar AS per tahun.

"Gagal memenangkan Guangdong dari segi bisnis itu biasa, toh Indonesia masih mendapatkan Fujian dan bagi pemerintah Indonesia khususnya Pemprov manfaatnya besar sekali," kata Gubernur Papua, JP. Salossa yang didampingi Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Manuel Kasiepo dan VP Government and Public Affair BP Indonesia, Satya W Yudha, kepada wartawan, Jumat (23/8), di Jakarta.

Dijelaskan Salossa, berdasarkan ketentuan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka 70 persen dari bagi hasil atas kegiatan eksplorasi gas alam, akan dikembalikan ke daerah dan sisanya 30 persen untuk pemerintah pusat. Dari hitung-hitungan yang dilakukan oleh Pemprov dan pemerintah pusat, berdasarkan data teknis dari pihak operator, maka potensi pendapatan yang diperoleh Pemprov mencapai 1,1 miliar dolar AS.

Dengan asumsi kapasitas tangguh diproduksi mencapai

volume hingga 2 train atau 6 juta ton per tahun. Adapun kapasitas untuk Fujian sebanyak 2,5 juta metrik ton per tahun ditambah pasar lainnya yaitu Filipina sebesar 1,3 juta metrik ton. Dan, potensi pasar dalam negeri khususnya pulau Jawa yang jumlahnya diperkirakan mencapai 3 juta metrik ton. "Kapasitas ini tentu saja bisa bertambah lagi kalau dalam perjalannya terjadi peningkatan permintaan pasar, apalagi potensi China sendiri masih ada sekitar 2,5 juta metrik ton," ujarnya.

Saat disinggung apakah Pemprov berkeinginan untuk memiliki saham pada proyek tersebut, menurut Gubernur, peluang tersebut cukup terbuka, apalagi pendapatan Pemprov cukup signifikan. "Kalau dilihat potensi pendapatan yang kita terima, kenapa tidak. Tapi hal itu akan kita bicarakan kemudian," ujarnya.

Meski pengiriman LNG ke Fujian baru akan berlangsung pada 2007 mendatang, menurut Salossa, pada tahun mendatang sudah dilakukan kegiatan konstruksi yang menyerap sekitar 300 hingga 500 orang tenaga kerja lokal, belum lagi dampak multiplier effect lainnya.

### Community Development

Bahkan, pihak BP Indonesia selaku operator juga telah diwajibkan untuk membuat program *Community Development* lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Kantor Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. "Jadi sama sekali tidak benar kalau proyek pengiriman LNG ke Fu-

jian itu merugikan Indonesia seperti anggapan sebagian orang," katanya.

Salossa menjamin, masyarakat Papua akan mendukung keberadaan proyek, karena studi Amdal yang dilakukan operator telah diselesaikan dan memenuhi kriteria. "Semula memang ada sedikit tarik-menarik seperti mengenai tanah dan lainnya. Namun, setelah diselesaikan dengan baik mereka sudah menyatakan sumpahnya secara adat untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut," katanya

Manuel Kasiepo mengatakan, keberadaan proyek besar seperti bidang migas dan pertambangan umum sangat bermanfaat khususnya bagi kawasan Timur Indonesia dibanding sektor lainnya karena mampu memberikan kontribusi pendapatan yang cukup signifikan, baik langsung seperti dari bagi hasil, pajak, retribusi dan lainnya juga dampak multiplier effect lain seperti penyerapan tenaga kerja dan pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Karenanya, kementeriannya sangat mendukung keberadaan proyek tersebut.

Sementara itu Satya W Yudha, mengungkapkan, secara teknis pelaksanaan proyek Tangguh tidak mengalami perubahan baik schedule dan lainnya, meski terdapat perubahan tujuan pasar utama dari Guangdong ke Fujian. "Tidak ada yang berubah, kecuali terdapat sedikit penyesuaian dalam kontrak kerjasama dengan pemerintah Cina, hal itu telah ditangani oleh tim kecil yang telah berangkat ke Cina awal pekan lalu," ujar Satya. (c21)

## GUNTINGAN BERITA

DE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIGAS	GATRA	72	31-8-2002

# Urung Menyedot GURUN PERAWAN

Perjanjian eksplorasi minyak Irak-Pertamina mandek. Masih menunggu hasil ratifikasi parlemen Irak. Perdagangan Indonesia ke Irak masih nol.

**N**UN di Moskow, ibu kota Rusia, Ahad dua pekan lalu. Tersiar kabar, "negeri beruang merah" itu bakal mengalirkan investasinya ke Irak senilai US\$ 40 milyar. Investasi gede itu sebagian besar di sektor perminyakan. Lainnya untuk proyek kelistrikan, jalan dan rel, serta produk kimia. Kerja sama ekonomi Rusia-Irak itu hampir final.

Meski hingga pekan lalu kontrak belum diteken, hubungan mesra Rusia-Irak itu memerahkan telinga Amerika Serikat. Buru-buru Washington memberi peringatan kepada Moskow. Tak lain karena ada Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1990 mengenai embargo minyak Irak—yang kemudian diperpanjang Dewan Keamanan PBB secara bertahap sejak awal 2002.

Sanksi PBB kepada Irak akibat invasi tentara Saddam Hussein ke Kuwait, 1990, itu tegas melarang semua negara anggota PBB bekerja sama di bidang perminyakan secara langsung dengan Irak. Hubungan bisnis yang dibolehkan PBB mesti melalui program *oil for food* alias perdagangan imbal beli minyak dengan makanan dan barang konsumsi lainnya (lihat: *Putin Memugar Dukungan*, rubrik *Luar Negeri*).

Rusia sebenarnya mafhum. Lukoil, perusahaan minyak terbesar yang berbasis di Moskow, yang menanam investasinya senilai US\$ 4 juta pada 1997, hingga kini belum melakukan eksplorasi awal sekali pun. Tak lain karena terbentur resolusi PBB.

Irak, dengan luas wilayah 435.000 kilometer persegi, memang cukup potensial cadangan minyaknya. Di wilayah utaranya tersebar deretan 78 ladang minyak. Sepanjang perbatasan dengan Arab Saudi bagian selatan hingga barat, sejumlah blok diperkirakan punya cadangan minyak sekitar 112 milyar barel.

Indonesia sendiri merintis bisnis minyak di "negeri seribu satu malam" itu se-

jak 1994. "Kami mengincar ladang minyak Tuba," kata Said Jabbar, pensiunan Wakil Kepala Badan Pembinaan Pengusahaan Kontraktor Asing Pertamina, kepada GATRA, Jumat pekan lalu. Said Jabbar waktu itu anggota tim negosiasi Pertamina.

Tuba terletak dekat Basra, di perbatasan dengan Iran, punya empat ladang minyak yang sudah berproduksi, masing-masing dengan kapasitas 2.000 barel per hari. Pertamina bersaing ketat dengan Oil Natural Gas Corporation Limited (India), Algerian Sonatrach Company (Aljazair), Chinese Petroleum Corporation (Taiwan), dan perusahaan tambang asal Rusia.

Ladang Tuba hampir dalam genggaman Pertamina. Draf kontrak eksplorasi dan produksinya sudah dibuat pada 1998. Namun, lantaran alasan politis, Irak lebih memilih India, yang akhirnya menggandeng Aljazair untuk mengoperasikan Tuba. "Indonesia tak pernah mendukung dengan tegas perjuangan Irak saat diinvasi Amerika," kata Muhammad Bawazier, Direktur Utama PT Sumarah Sakti, perusahaan energi yang empat kali bolak-balik ke Baghdad.

Tudingan lain dilontarkan seorang pengusaha minyak. Gagalnya Pertamina merengkuh Tuba, katanya, lantaran tim pemerintah di era Abdurrahman Wahid tak jago lobi. "Petinggi Irak tak suka dengan cara petinggi Indonesia yang tembak langsung minta ini-itu," kata sang juragan.

Akhirnya, Pertamina cuma kebagian Blok-3 Western Desert, daerah gurun yang masih perawan. Blok-3 terletak di barat daya Baghdad, sekitar 300 kilometer dari ibu kota Irak. Diperkirakan, Blok-3 menyimpan cadangan minyak 3 milyar barel.

# GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL



## GUNTINGAN BERITA

DE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL

Ketika itu, semasa Menteri Pertambangan dan Energi, I.B. Sudjana (almarhum), ditandatangani nota kesepahaman projek Blok-3. Namun, kontrak eksplorasi dan pengembangannya baru diteken 23 April lalu. Bila Pertamina sukses menemukan cadangan minyak dalam tiga tahun pertama, dengan belanja projek sekitar US\$ 24 juta, kerja sama akan diperpanjang dua tahun. Dalam tahap kedua ini, Pertamina diwajibkan melakukan eksplorasi dengan nilai US\$ 12 juta.

Jika dalam masa lima tahun itu si "kuda laut" berhasil menemukan cadangan minyak yang ekonomis, Pemerintah Irak akan memperpanjang kontrak eksplorasinya 20 tahun lagi. Diperkirakan, pengelolaan Blok-3 menggembungkan kocek Pertamina sekitar US\$ 200 juta per tahun. Jumlah yang menggiurkan.

Sayang, kontrak perdana Pertamina-Irak itu belum berkelanjutan. Pertamina belum melakukan kegiatan apa pun di sana. Sesuai dengan perjanjian, Pertamina mestinya sudah melakukan survei dan menyerahkan proposal garis besar pengembangan, sebelum tenggat 90 hari sejak kontrak diteken.

Proposal itu berisi, antara lain, kualitas minyak, ketebalan dan area eksplorasi, perkiraan kapasitas produksi, dan modal awal yang dibutuhkan.

Menurut Pertamina, terlampauinya *deadline* tersebut bukan lantaran pihaknya tak becus. "Kontrak kerja sama itu sedang diratifikasi parlemen Irak sebelum dilaksanakan," kata Surantoko, Asisten Direktur Hulu Pertamina, kepada Oke In-drayana Trianto dari GATRA.

Surantoko menepis anggapan kemandekan itu lantaran intervensi Amerika, "musuh abadi" Saddam Hussein, dan Kuwait, "negeri para emir" kolega Amerika. Meskipun begitu, adanya tekanan dari politisi "negeri Paman Sam" ini dibenarkan Lalu Mara Satriawangsa, *Corporate Communication* Kelompok Usaha Bakrie. "Kami mundur dari program *oil for food* karena desakan Amerika," kata Lalu Mara kepada wartawan GATRA, Taurusita Nugrani.

Bakrie sebenarnya berminat membeli minyak Irak. Mendadak, seorang senator dari Partai Republik, tempat bernaung Presiden Goerge W. Bush, datang menemui petinggi Bakrie. "Ya mendesak kami membatalkan niat berbisnis dengan Irak," kata Lalu Mara. Selain membatalkan pembelian minyak, Bakrie juga urung meneruskan kongsinya dengan perusahaan

Prancis untuk memburu minyak Irak.

Agak aneh bila Indonesia mesti grogi oleh gertakan Amerika. Padahal, program imbal dagang minyak dengan makanan itu adalah satu-satunya cara berbisnis dengan Irak yang dilegalkan PBB. Sejak tahap pertama embargo, pemerintah sebenarnya mendapat porsi besar untuk membeli minyak Irak. Entah mengapa —barangkali memang takut pada Amerika— jatah impor tersebut tak selalu dipenuhi Indonesia.

PT Perta Oil, anak perusahaan Pertamina, yang mendapat jatah hanya mampu membeli di bawah target Irak. *Track record* Indonesia pun di mata Pemerintah Irak buruk. Selama kurun 10 tahun, nilainya hanya US\$ 300 juta.

Perusahaan swasta nasional yang terlibat program *oil for food* pun masih minim. Hanya dua perusahaan swasta nasional yang diakui Irak. Yakni PT Medco Energi Internasional milik Arifin Panigoro dan Ade Nasution, pengusaha yang banyak bergerak di bidang pembiayaan. Ade adalah satu di antara pemilik saham di Hotel Crowne Plaza, Jakarta. Ade menang tender di Irak, dua tahun lalu. "Tapi, prosesurnya rumit karena harus melibatkan PBB dan Pemerintah Irak," katanya.

Sedangkan Medco, dalam tiga tahun terakhir ini, membeli minyak Irak 6 juta barel tiap tahun. "Kami memasarkannya khusus di daerah Asia Pasifik," kata Hilmi Panigoro, *Chief Executive Officer* Medco. Dengan cara itu, Medco terdaftar sebagai pedagang minyak yang diakui Irak. Medco sendiri punya target jangka panjang. "Melakukan investasi bidang eksplorasi dan produksi begitu embargo nantinya dicabut," Hilmi menambahkan.

Total perdagangan pemerintah plus swasta tersebut terbilang kecil dibandingkan dengan India. "Negeri Bollywood" itu mampu merealisasikan pembelian minyak Irak senilai US\$ 1,53 milyar. Pembayaranannya dengan suplai obat-obatan, gandum, beras, peralatan untuk jalan rel, dan infrastruktur kelistrikan. India juga berani masuk ke bidang eksplorasi perminyakan senilai tak kurang dari US\$ 63 juta.

Iklm usaha di Irak, menurut Dahlan Abdul Hamied, Duta Besar RI di Baghdad, begitu menggeliat. Negara-negara Eropa dan Asia berlomba-lomba masuk. Negeri jiran Malaysia, misalnya, berani membangun pabrik ban. Lucunya, Indonesia hingga kini melakukan hubungan dagang melalui negara ketiga. "Di sini banyak produk pakaian Indonesia, tapi masuknya dari negara lain," kata Dahlan.

Memang repot kalau mesti bergantung pada utang Amerika. Buntutnya, mau berkawan dengan siapa pun takut kena marah. □

DIPO HANDOKO

# GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIGAS	RAKYAT MERDEKA	13	25-00-2002

## FOKUS

### HARGA MINYAK TETAP MELANGIT

Para pedagang minyak mengambil keuntungan dari harga yang naik akhir-akhir ini Kamis, tetapi pasar tetap mendekati tingkat harga tinggi pada saat terjadi perpaduan antara kekhawatiran suplai dan ketakutan akan konflik militer di kawasan Teluk yang kaya minyak. Minyak mentah Brent patokan internasional turun 39 sen menjadi 27,02 dolar per barel di London, kembali turun dari tingkat tinggi selama empat bulan pada hari sebelumnya.

Minyak mentah AS penyerahan kemudian turun 40 sen yakni 28,84 dolar, memecahkan tingkat harga selama 10 hari terus menerus dalam keadaan tinggi selama 18 bulan di atas 30 dolar per barel awal pekan ini. Walaupun beberapa penjualan biasa-biasa saja Kamis, harga masih sekitar 10 persen lebih tinggi dari dua minggu lalu. Para analis menambahkan penguatan harga itu merupakan tanda-tanda menipisnya inventaris minyak dalam satu musim ketika cadangan itu biasanya naik menjelang periode permintaan yang memuncak pada musim dingin.

"Kecenderungan inventaris turun pada keadaan normal pada kuartal ketiga anda akan mengharapkan untuk dibangun," kata Alastair Syme dari bank investasi Merrill Lynch.

Ekspor Irak yang dikurangi dari OPEC mengekang suplai bersamaan menurunkan tingkat cadangan, sedangkan para pedagang melihat ketidakpastian apakah cartel minyak itu akan memutuskan menaikkan kuota produksi pada pertemuan bulan September.

Pengamat energi Barat, Badan Energi Internasional mendesak Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) Rabu untuk mengurangi pengekangan pada saat merundingkan tinjauan kembali kebijaksanaan bulan depan dan menghindari kenaikan harga musim dingin ini.

Anggota OPEC, Kuwait awal pekan ini mengatakan, pihaknya tidak mengharapkan ada tambahan minyak dari OPEC pada kuartal keempat, meskipun para pejabat organisasi itu mengatakan mereka akan membuka kran jika harga referensi naik di atas 28 dolar dalam waktu lama. (RTR)